
Analisis Probabilitas Sikap Indonesia Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan Tahun 2021*

Ida Susilowati,¹ Muh Zulfadillah Alvarezel,² Rafif Ibnu Widyadana,³
Syahril Ady Fahlanda Siregar⁴
Universitas Darussalam Gontor Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i6.25015](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i6.25015)

Abstract

Shortly after the withdrawal of US troops in Afghanistan, the Taliban quickly occupied the Afghan capital, Kabul. President Biden's decision to withdraw these troops from Afghanistan has attracted a lot of attention from various parties. Indonesia as a Muslim-majority country of course needs to determine its attitude towards the Taliban's rule. This journal analyzes the probability of Indonesia's attitude towards the Taliban government after the withdrawal of US troops in Afghanistan. The method used is descriptive qualitative with literature study data collection techniques. The results show that Indonesia tends to focus on establishing peace and upholding the rights of every citizen in Afghanistan. This is viewed from the principle of Indonesia's foreign policy which is "Free and Active" as well as the concept of norms and identity in the constructivism paradigm.

Keywords: *Taliban, Free and Active Politics, Norms and Identity, Constructivism*

*Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 28 Februari 2022.

¹ **Ida Susilowati** adalah Dosen Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. idasusilowati@unida.gontor.ac.id

² **Muh Zulfadillah Alvarezel** adalah Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. muhammadzulfadillahalvarezel@mhs.unida.gontor.ac.id

³ **Rafif Ibnu Widyadana** adalah Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. rafifibnuwidyadana35@mhs.unida.gontor.ac.id

⁴ **Syahril Ady Fahlanda Siregar** adalah Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. syahriladyfahlandasiregar40@mhs.unida.gontor.ac.id

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan letak geografis, Afghanistan merupakan negara yang berada di wilayah Asia Selatan, berbatasan dengan Pakistan di sebelah selatan dan timur, Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan di sebelah utara, serta China di bagian timur laut.⁵ Posisi Afghanistan yang berada di persimpangan Asia tengah, barat dan selatan cukup berpengaruh pada kebijakan politik, hubungan luar negeri, serta statusnya sebagai negara merdeka⁶. Pada tanggal 19 Agustus 1919 melalui perjanjian Rawalpindi, Afghanistan secara resmi menjadi negara yang merdeka.⁷ Meski demikian, bukan berarti Afghanistan bebas dari segala konflik yang terjadi.

Pada masa pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani, Afghanistan dilanda kekacauan. Instabilitas sosial muncul dengan banyaknya kejahatan jalanan yang digerakkan para mafia lokal. Mullah Muhammad Omar yang merasa prihatin dengan keadaan tersebut, memulai gerakannya dalam misi pemberantasan kejahatan.⁸ Para pelajar madrasah diajak untuk melawan kejahatan di Afghanistan, yang akhirnya melahirkan kelompok Taliban. Sejak tahun 1994, Taliban sukses melaksanakan operasi militernya. Pada tahun 1996 para pelajar yang dibesarkan dalam masa perang ini berhasil merebut Kabul.⁹

Madrasah-madrasah yang berada di Qandahar dan perbatasan Afghanistan-Pakistan berhasil menaklukkan Kabul dan mendeklarasikan terbentuknya negara Islam pada tahun 1996. Sementara Mullah `Umar ditetapkan sebagai *Amirul Mu`minin* (pemimpin orang beriman) Afghanistan. Taliban memiliki akses mudah untuk menaklukkan wilayah selatan Afghanistan yang dikomandoi para Muhajidin. Sejak September sampai Desember 1994, Qandahar, Urzughan, Zabul dan Helmand berhasil dikuasai oleh Taliban. Taliban menyatukan dan mengontrol bagian selatan Afghanistan sejak Januari 1995 dan menerapkan hukum Islam di Afghanistan dengan mendirikan kementerian *Amar Ma`ruf Nahi Munkar*. Hal ini yang tidak disukai Amerika Serikat. Etasham Anwar Mahar menjelaskan, bahwa Kementerian *Amar Ma`ruf Nahiy Mungkar* bertugas mengontrol penerapan hukum Islam di Afghanistan. Kementerian ini

⁵ WorldAtlas, "Maps of Afghanistan" dalam <https://www.worldatlas.com/maps/afghanistan>, diunduh pada 27 Agustus 2021.

⁶ Sally Ann Baynard, "Historical Setting", dalam *Afghanistan A Country Study* (Washington DC: The American University, 1986) h. 3

⁷ Meredith L. Runion, *The History of Afghanistan*, (Santa Barbara: ABC-CLIO LLC, 2017).

⁸ Durrotun Nafisah, *Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996 – 2001*, (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel, 2019).

⁹ David B. Edwards, *Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad*, (California: University of California Press, 2002).

menugaskan satuan-satuan keamanan semacam polisi yang bekerja untuk memastikan berjalannya syariat Islam di masyarakat Afghanistan.¹⁰

Taliban berhasil menaklukan Hizb Islami pimpinan Hekmatyar di selatan Kabul pada tahun 1995. Namun, Taliban gagal menguasai Kabul dan terpaksa mundur ke wilayah selatan, akibat tudingan Hekmatyar bahwa Taliban adalah tentara komunis dari partai Khalq. Tudingan tersebut membuat Taliban diposisikan oleh rakyat Afghanistan sebagai musuh. Taliban akhirnya mengubah arah operasi militernya ke wilayah Barat yaitu Hena.¹¹ Pada tahun 1996, barulah taliban berhasil menguasai Kabul. Tantangan muncul dari Amerika Serikat atas pemberlakuan syariat Islam di Afghanistan, sehingga Taliban dikecam dunia dan PBB sebagai tindakan pelanggaran HAM.

Pada Oktober 2001, Amerika Serikat menginvasi pasukan militernya ke Afghanistan, dengan dalih menangkap Osama bin Laden dengan tuduhan terorisme atas kasus 9/11 dalam serangan ke WTC. Taliban dituduh melindungi al-Qaeda dan Osama bin Laden. Akhirnya, Taliban berhasil ditaklukan dan mundur ke daerah pegunungan terpencil di Pakistan. Pada 20 Desember 2001, PBB memberi mandat kepada Pasukan Bantuan Keamanan Nasional (ISAF), untuk menjaga keamanan di Kabul dan sekitarnya, dengan mengirimkan pasukan AS ke Afghanistan sebagai upaya menjaga perdamaian.¹²

Pada tanggal 14 April 2021, Presiden Joe Biden mengumumkan penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada 31 Agustus 2021 atau sebelum peringatan 20 tahun tragedi 9/11.¹³ Biden menegaskan, bahwa sudah waktunya bagi Afghanistan untuk memutuskan masa depan sendiri dalam menjalankan negaranya.¹⁴ Biden menambahkan, bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk menghentikan perang yang telah melampaui tujuan awal, yaitu menghukum Taliban karena dianggap memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dalam peristiwa

¹⁰ Ehtasham Anwar Mahar, "Realitas Taliban", dalam Osama bin Laden Melawan Amerika (Bandung: Mizan, 2001), hlm 77 – 81.

¹¹ Durotun Nafisah, Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹² Fahriani, Gerakan Taliban di Afghanistan Tahun 1994-2014 M, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020).

¹³ Iswara dan Adhitya Jaya, "Kenapa Amerika Meninggalkan Afghanistan sehingga Taliban Merajalela? Begini Ceritanya" dalam <https://internasional.kompas.com/read/2021/08/17/152357470/kenapa-amerika-meninggalkan-afghanistan-sehingga-taliban-merajalela?page=all#page2>, diunduh pada 26 September 2021.

¹⁴ Gryfid Talumedun, "Mengapa Amerika Serikat Tinggalkan Afghanistan dan Membuat Taliban Berhasil Berkuasa, Simak Kisahnya" dalam <https://manado.tribunnews.com/2021/08/20/mengapa-amerika-serikat-tinggalkan-afghanistan-dan-membuat-taliban-berhasil-berkuasa-simak-kisahny?page=all>, diunduh pada 26 Agustus 2021.

9/11.¹⁵ Meskipun demikian operasi anti-terorisme tetap berlanjut di negara Afghanistan.

Tidak lama setelah penarikan pasukan AS dari Afghanistan, Taliban dengan cepat menduduki ibu kota Afghanistan, Kabul. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan, bahwa Taliban masuk ke Kabul dengan aman dan damai.¹⁶ Taliban yang dulu berbeda dengan Taliban yang sekarang. Taliban mengizinkan perempuan untuk belajar dan kuliah dengan melakukan pemisahan dengan laki-laki. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya Konferensi Pers yang Taliban laksanakan pada tanggal 17 Agustus, yang menyatakan akan menghormati hak-hak perempuan dan kebebasan pers.¹⁷ Bagaimana Indonesia bersikap dan menanggapi pemerintahan Taliban setelah penarikan angkatan darat AS di Afghanistan pada bulan Agustus 2021?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap Indonesia terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan berdasarkan prinsip politik luar negeri Indonesia, bebas aktif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian jenis kualitatif ini, menerapkan metode deskriptif analitis dengan tehnik pengumpulan data melalui studi pustaka. Konsep kebijakan luar negeri bebas aktif dalam perspektif konstruktivis digunakan sebagai dasar tehnik analisa penelitian, untuk menjelaskan probabilitas kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam merespon isu di Afghanistan terkait keberhasilan Taliban menduduki Kabul, ibukota Afghanistan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerangka Konstruktivis

Teori konstruktivisme merupakan salah satu paradigma hubungan internasional yang baru di pelajari di perguruan tinggi di Indonesia sekitar awal 2000-an. Akar pemikiran konstruktivisme sebenarnya bukan teori hubungan internasional, akan tetapi merupakan teori sosiologi yang diaplikasikan kedalam

¹⁵“Joe Biden Buka Suara Soal Penarikan AS dari Afghanistan” dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210817085929-134-681383/joe-biden-buka-suara-soal-penarikan-as-dari-afghanistan>, diunduh pada 26 Agustus 2021.

¹⁶Andrian Saputra, “Hadirkan Taliban Baru” dalam <https://www.republika.co.id/berita/qzlo17483/hadirkan-taliban-baru>, diunduh pada 26 September 2021.

¹⁷ Unggul Wirawan, “Taliban Janji Menghormati Hak-Hak Perempuan dan Kebebasan Pers” dalam <https://www.beritasatu.com/dunia/815335/taliban-janji-hormati-hakhak-perempuan-dan-kebebasan-pers>, diunduh pada 26 September 2021.

ranah hubungan internasional. Akar pemikiran ini dapat ditemukan pada dekade 1980-an, ketika ada perdebatan besar ketiga (*Third Great Debate*). Dalam perdebatan tersebut, tidak sedikit ilmuwan hubungan internasional yang meminjam beberapa disiplin sosiologi dan psikologi karena dipandang cukup relevan dengan isu hubungan internasional yang menyediakan kerangka pikir interpretatif.¹⁸

Asumsi dasar aliran konstruktivisme memandang bahwa aktor internasional tidak hanya negara, tetapi juga non-negara. Kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara tidak terlepas dari pengaruh aktor-aktor transnasional. Mengenai kepentingan nasional, konstruktivis memandang bahwa kepentingan nasional bukanlah sesuatu yang sudah terjadi, akan tetapi sesuatu yang muncul dalam proses interaksi antara aktor yang satu dan yang lainnya. Konsekuensinya adalah, bahwa kepentingan nasional suatu negara tidak bersifat baku dan berlaku pada semua negara, akan tetapi dapat berubah tergantung pada konteks sosial yang dilakukan oleh para aktor dan variatif di setiap negara.¹⁹ Kepentingan nasional juga bervariasi karena setiap negara memiliki kepentingannya sendiri. Sehingga, kebijakan negara ditentukan oleh kepentingan negaranya sendiri, dan kepentingan negara ditentukan oleh identitas negara. Sementara dalam struktur internasional, konstruktivis berasumsi bahwa elemen ideasional merupakan klaim konstruktivisme terhadap bentuk struktur internasional.

2. Implementasi Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerangka Konstruktivisme

Identitas personal adalah identitas yang berasal dari ciri-ciri intristik suatu negara dan cenderung bersifat bawaan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim. Sama halnya dengan negara Afghanistan merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam. Sebagai sesama negara muslim tentu banyak bantuan yang diberikan oleh negara Indonesia kepada Afghanistan dalam membantu mencari solusi untuk perdamaian. Pertemuan antara presiden Joko Widodo dengan presiden Asyraf Ghani pada 5 April 2017 di Jakarta, menjadi salah satu contoh bahwa identitas personal negara menjadi salah satu alasan negara melakukan kerjasama bilateral. Pertemuan tersebut membahas tentang peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian di

¹⁸ OpCit, Mohamad Rosyidin, h. 77

¹⁹ OpCit, Mohamad Rosyidin, h. 82

Afghanistan. Komitmen Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan lagi dalam kunjungan balasannya pada Presiden di Kabul.

Pada tanggal 27 juli 2019, wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla bersama Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Nahdatul Ulama menerima undangan delegasi Taliban, yang saat itu dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil meyakinkan pemerintahan Taliban agar menempuh jalan perdamaian melalui perundingan.²⁰ Jusuf Kalla juga mampu menarik perhatian kelompok Taliban untuk menempuh jalur damai dalam menyelesaikan konflik yang sudah bertahun-tahun.

Dilansir dari antaranews.com, selain diplomasi perdamaian, pemerintah Indonesia juga memberikan santunan atau bantuan dana hibah untuk membangun masjid, klinik, dan pusat studi Islam yang berfungsi sebagai pusat pengetahuan Islam dan interaksi antar berbagai kelompok. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan perdamaian di Afghanistan. Klinik yang bertempat di Ahmad Shah Baba, Mina, Kabul tersebut bisa melayani penduduk distrik bagrami dan menjaring 6 distrik lainnya, dengan layanan rawat jalan dan rawat inap. Klinik tersebut dijadikan rujukan karena peralatannya yang lengkap.²¹ Selain itu, presiden Joko Widodo tidak memulangkan para diplomatnya yang sedang bertugas di daerah afghanistan dengan tujuan akan menjalin hubungan dengan pejuang Afghanistan yang akan memimpin daerah tersebut.²² Dengan dikuasainya Afghanistan oleh pemerintah Taliban, menguatkan indikasi bahwa Afghanistan akan menjadi Republik Islam Afghanistan. Negara tersebut akan memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan menarik para investor asing dan mengurangi dominasi Amerika Serikat di kawasan negara tersebut.

Salah satu norma internasional yang dijunjung tinggi oleh setiap negara adalah Hak Asasi Manusia. Dalam *Universal Declaration of Human Right*, artikel kedua menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya berupa status politik, yurisdiksi atau internasional dari negara atau wilayah di mana seseorang berasal.²³ Berdasarkan deklarasi tersebut, Indonesia termasuk negara

²⁰ Ali Noer Zaman, "Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Upaya Perdamaian Di Afghanistan" dalam INDEPENDEN, 2020.

²¹ Iskandar, M.A, "Pemerintah Indonesia Sumbang Pembangunan Masjid di Afghanistan", dalam <https://www.antaraneews.com>, diunduh pada 20 September 2021.

²² Marselinus Gual, *OpCit*

²³ Un.org, "Universal Declaration of Human Right", dalam <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diunduh pada 25 September 2021.

yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, salah satunya dengan tidak adanya diskriminasi antara pria dan wanita di Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Indonesia memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Begitu juga hak politik, baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama dalam menduduki kursi parlemen dengan syarat-syarat tertentu.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Indonesia mendukung pemerintah Taliban agar memperlakukan perempuan selayaknya dan dapat menimba ilmu di kejuruan atau perguruan tinggi. Sebagai implikasi dari *Universal Declaration of Human Right*, jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memberikan pernyataannya terhadap sikap konflik yang terjadi di Afghanistan. Jaringan KUPI menyatakan sikap terkait realisasi risalah Islam *rahmatan lil 'aalamiin* (rahmat bagi seluruh alam) melalui surat terbuka yang terdiri dari beberapa poin yaitu;²⁴ *Pertama*, KUPI berharap pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil yang memiliki rekam jejak hubungan baik dengan pihak Afghanistan agar dapat mewujudkan situasi aman, damai, dan bersatu segera terwujud. *Kedua*, mendorong dan mendukung terwujudnya syariat islam *rahmatan lil 'aalamiin*, yaitu yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai hamba Allah dan sesama manusia. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya, yang artinya; *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*²⁵ *Ketiga*, mendukung dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melindungi dan memajukan hak-hak perempuan dan anak, untuk mewujudkan masyarakat, umat dan bangsa yang adil, sejahtera, dan maju peradaban, bangsa dan negaranya.

Pada tanggal 12 September 2021, Menteri Pendidikan Tinggi pemerintahan baru Taliban, Abdul Baqi Haqqani mengadakan Konferensi Pers. Dalam konferensi pers tersebut, menteri Haqqani menyatakan bahwa siswi akan dikenakan aturan pakaian wajib. Pemisahan antara siswa dan siswi juga akan diberlakukan. Selain itu, sebisa mungkin siswi akan diajar oleh guru perempuan. Pemisahan ruang kelas ini dilakukan dengan pemasangan tirai pada ruang-

²⁴ Mutia Yuantisya, “Tanggapi Kondisi di Afghanistan, Ulama Perempuan Indonesia Menyampaikan 3 Tuntutan”, dalam <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-012587087/tanggapi-kondisi-di-afghanistan-ulama-perempuan-indonesia-menyampaikan-3-tuntutan>, diunduh pada 25 September 2021.

²⁵ Al Qur'an, Surah Al Hujurat ayat 13.

ruang kelas.²⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Taliban secara resmi memberikan hak pendidikan bagi perempuan di Afghanistan, namun tetap dalam koridor syariat Islam.

3. Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Demi mencapai kepentingan nasional, pelaksanaan politik luar negeri tiap-tiap negara harus berlandaskan prinsip masing-masing negara. Prinsip politik luar negeri Indonesia sendiri seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah prinsip “Bebas Aktif”. Secara umum, prinsip politik bebas aktif ini tidak banyak mengalami perubahan di tengah pergantian pemimpin di Indonesia. Namun implementasi atau pelaksanaan dan penggambaran dari prinsip tersebut lah yang mengalami perubahan dari setiap kepemimpinan.

Salah satu contohnya adalah pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi dalam kebijakan luar negerinya, menekankan pada *maritime centered* (*maritime centered foreign policy*), strategi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur maritim (tol laut, pelabuhan, dan perkapalan), pengembangan sumber daya maritim, pengembangan sektor perikanan, dan promosi UKM (Usaha Kecil dan Menengah).²⁷ Hal ini didasari dengan landasan operasional politik luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

4. Implikasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia-Afghanistan

Biaya perang yang meningkat menjadi hampir 100 miliar dollar AS (sekitar Rp. 1,43 Kuadriliun) per tahun ketika tentara Amerika di Afghanistan berjumlah 100.000 lebih, cukup membuat sirkulasi keuangan AS merugi. Kementerian pertahanan AS menyatakan, bahwa pengeluaran militer di Afghanistan dari Oktober 2001 hingga September 2019 telah mencapai 778 Miliar dollar AS. Selain itu, 44 miliar dollar AS dikeluarkan untuk membiayai proyek-proyek rekonstruksi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bersama

²⁶ Althaf, “Taliban Soal Hak Perempuan: Boleh Menempuh Pendidikan Tinggi, Asal Ada Pemisahan”, dalam <https://www.annah.com/2021/09/12/taliban-soal-hak-perempuan-boleh-menempuh-pendidikan-tinggi-asal-ada-pemisahan/>, diunduh pada 25 September 2021.

²⁷ Nur Amaliyah, Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015), h. 36

Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dan lembaga pemerintah lainnya.²⁸ Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan menjadi babak baru dalam perpolitikan Afghanistan sekaligus politik internasional, mengingat Afghanistan seringkali dikaitkan dengan dua negara besar, Amerika Serikat dan Rusia. Penaklukan Afghanistan oleh Taliban tidak terlepas dari politik luar negeri Indonesia dalam merespon peristiwa tersebut.

Upaya untuk menciptakan perdamaian telah banyak dilakukan oleh pemerintahan Afghanistan dan aktor internasional lainnya dengan Taliban. Diantara upaya menciptakan perdamaian adalah upaya pengurangan militer oleh komunitas internasional yang akhirnya mengalami kebuntuan. Berbagai permasalahan yang terjadi juga menyulitkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Salah satunya adalah bantuan dari komunitas internasional yang tidak meninggalkan Afghanistan karena beranggapan masih adanya ancaman dari Al-Qaeda yang membahayakan Keamanan Internasional.²⁹

Berbagai macam bantuan datang dari para aktor Internasional, mulai dari pengiriman Pasukan AS dan NATO dalam jumlah besar, seperti bantuan biaya dari berbagai macam negara untuk program rekonstruksi serta misi bantuan dari PBB. Pada Mei 2015, pihak Afghanistan dan Taliban bernegosiasi membicarakan perdamaian di Qatar. Pertemuan tersebut menghasilkan jaminan kontraterorisme dari Taliban, penarikan pasukan asing, negosiasi intra-Afghanistan dan kesepakatan gencatan senjata permanen.

Salah satu poin penting dalam prinsip politik luar negeri bebas aktif adalah menjaga perdamaian dan stabilitas negara, serta meredakan pertikaian yang terjadi pada ranah Internasional. Dalam kasus ini, Indonesia mempunyai peran yang cukup penting. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan mediator konflik oleh Afghanistan. Alasan Afghanistan memilih Indonesia sebagai mediator, karena Indonesia dianggap sebagai negara yang netral berdasarkan politik luar negeri bebas aktif dan sejarah Indonesia sebagai pelopor gerakan Non-Blok pasca perang dingin. Selain itu, Indonesia dianggap memiliki modal besar untuk menyelesaikan

²⁸ Reality Check Team, "Afghanistan: What has the conflict cost the US and its allies?" dalam <https://www.bbc.com/news/world-47391821>, diunduh pada 26 September 2021.

²⁹ Luza Umami, "Analisa Politik Luar Negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam upaya Mediasi Konflik Afghanistan Tahun 2017-2019", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

masalah konflik internal maupun eksternal. Indonesia juga dinilai tidak memiliki kepentingan politik maupun ekonomi di Afghanistan.³⁰

Langkah optimis dalam tatanan global, menjunjung tinggi nilai Islam toleran didunia, dan keinginan untuk membantu menyelesaikan berbagai macam konflik menjadikan Afghanistan melirik Indonesia sebagai salah satu mediator konflik permasalahan Afghanistan-Taliban. Upaya yang dilakukan Indonesia sebagai mediator konflik adalah dengan membuka Pertemuan Trilateral (Indonesia, Afghanistan, dan Paskitan) Ulama, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan maksud, sebagai upaya Indonesia membantu *peace bulding* di Afghanistan Pada 11 februari 2018.³¹ Didalam pertemuan tersebut dinyatakan bahwasannya ulama berperan penting dalam mendorong perdamaian yang inklusif di Afghanistan, serta menegaskan bahwasannya Indonesia berkomitmen memfasilitasi peran konstruktif ulama.

Peace Building atau bina damai yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya dalam membantu Afghanistan diantaranya dengan cara penggalangan dukungan internasional melalui perpanjangan misi bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan untuk pedamaian Afghanistan. Selain itu, Pembangunan Kapasitas (*capacity bulding*) untuk Afghanistan juga menjadi salah satu upaya Indonesia melalui berbagai macam program seperti pendidikan, pelatihan, workshop. Kontribusi Indonesia dalam hal *capacity building* juga cukup signifikan dalam membantu pemerintah dan masyarakat Afghanistan dalam meningkatkan kualitasnya dalam mengisi pembangunan perdamaian dalam upayanya untuk menciptakan negara yang aman, demokratis, dan sejahtera.³²

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi juga memberikan pernyataan pada saat menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi PBB secara virtual terkait situasi kemanusiaan di Afghanistan. Pertemuan yang dilaksanakan pada Senin, 13 September 2021 tersebut membahas tentang keselamatan dan kehidupan masyarakat Afghanistan sebagai prioritas utama.³³

³⁰ Ani Nursalikah, "MUI: Afghanistan Pilih Indonesia sebagai Juru Damai", dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/03/07/p55s9l366-mui-afghanistan-pilih-indonesia-sebagai-juru-damai>, diunduh pada tanggal 12 September 2021.

³¹ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Dorong Perdamaian, Presiden Jokowi Buka Pertemuan Ulama Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan", dalam <https://setkab.go.id/dorong-perdamaian-presiden-jokowi-buka-pertemuan-ulama-indonesia-afghanistan-dan-pakistan/>, diunduh pada tanggal 15 September 2021.

³² Robi Sugara, "Upaya dan Kontribusi Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui BINA-DAMAI", dalam MUKADIMAH, Vol. 5, 2021, h. 27-38

³³ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Di Forum PBB, Menlu RI: Keselamatan dan Kehidupan Masyarakat Afghanistan Prioritas Utama", dalam <https://setkab.go.id/di-forum-pbb->

Menlu RI berpendapat, bahwa Indonesia terus berharap akan adanya pemerintahan yang inklusif, perlindungan HAM, dan upaya mencegah merebaknya terorisme di Afghanistan. Sebagai mediator konflik di Afghanistan, Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan dana kepada masyarakat Afghanistan dan bantuan untuk mendukung pembangunan di Afghanistan selama tiga tahun ke depan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pertambangan. Sebagai mediator konflik, Indonesia melakukan perundingan diplomasi perdamaian dengan Taliban untuk menempuh jalan damai dalam menyelesaikan konflik di Afghanistan, dengan menerima kunjungan delegasi Taliban yang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar ke Jakarta.³⁴

5. Probabilitas Sikap Indonesia Terhadap Pemerintahan Taliban di Afghanistan Berdasarkan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Jika merujuk pada tindakan-tindakan Indonesia yang berdasar pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, maka dapat dikatakan bahwa dalam kasus Taliban-Afghanistan ini Indonesia tidak menolak ataupun mengakui pemerintahan Taliban. Namun, dengan demikian bukan berarti Indonesia acuh tak acuh terhadap kasus ini. Seperti yang dilandaskan pada pembukaan UUD 1945 bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, Indonesia dalam hal ini lebih berkecimpung untuk menciptakan perdamaian antar kedua belah pihak.

Realisasi dari sikap ini dapat dilihat dari beberapa tindakan Indonesia. Salah satunya adalah penggelaran Diplomatic Forum dengan tema "*Situasi Geopolitik Dunia Pasca Taliban Berkuasa*" di RedTop Hotel, Pecenongan, Jakarta pada Kamis 16 September 2021. Forum ini menghadirkan empat pembicara, yakni Mr. Muhammad Faisal Fayyaz, Deputy Head of Mission Kedutaan Besar Pakistan, Wisnu Widiyantoro, Negosiator Perdagangan Ahli Muda Sub Koordinator Asia Selatan dan Tengah, Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan dan Teguh Santosa, pengamat Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Forum ini membahas mengenai situasi geopolitik dunia, situasi pemerintahan Taliban dan bagaimana kelangsungan Afghanistan di tangan Taliban.³⁵

[menlu-ri-keselamatan-dan-kehidupan-masyarakat-afghanistan-prioritas-utama/](#), diunduh pada 15 September 2021.

³⁴ Ali Noer Zaman, "Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo dalam Upaya Perdamaian di Afghanistan", dalam INDEPENDEN Vol. 1, No. 2, 2020, h. 95-106.

³⁵ Cindy Damara, "9 Negara Termasuk Indonesia Komunikasi ke Taliban, Minta Bentuk Pemerintahan Demokratis", dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4659927/9-negara->

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha berpendapat, bahwa pemerintah Indonesia bisa saja mengakui pemerintahan Taliban. Terjalinnnya hubungan Presiden Indonesia, Joko Widodo dengan Pejuang Taliban yang terdapat di Doha, Qatar. Syaifullah berpendapat, bahwa pemerintah Indonesia mengambil sikap yang tegas dengan tidak memulangkan para diplomatnya dari Afghanistan, termasuk Duta Besar Indonesia di Afghanistan.³⁶ Sikap ini tentunya merupakan refleksi dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada perdamaian dunia dan tidak condong pada satu pihak yang dimana prinsip ini akan selalu dipegang teguh dalam setiap kebijakan pemerintah Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pada tanggal 17 Agustus 2021, Taliban mendeklarasikan pemerintahannya dengan diadakannya Konferensi Pers yang banyak memuat tentang pemberian hak-hak perempuan dan kebebasan pers. Berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, pemerintah Indonesia tidak menolak ataupun mengakui pemerintahan Taliban atas Afghanistan. Sikap ini lebih cenderung pada penciptaan perdamaian antar kedua belah pihak. Selain itu, KUPI sebagai non-state actor Indonesia juga menyatakan sikap melalui surat terbukanya, yang mendorong Taliban merealisasikan risalah islam *rahmatan lil 'aalamiin* (rahmat bagi seluruh alam). Kedua hal tersebut sebagai refleksi dari sikap Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai salah satu dari norma internasional.

REFERENSI:

- Althaf. *Taliban Soal Hak Perempuan: Boleh Menempuh Pendidikan Tinggi, Asal Ada Pemisahan*. 12 September 2021. <https://www.arammah.id/2021/09/12/taliban-soal-hak-perempuan-boleh-menempuh-pendidikan-tinggi-asal-ada-pemisahan/>.
- Amaliyah, Nur. *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015.
- Baynard, Sally Ann. "Historical Setting." Dalam *Afghanistan A Country Study*, oleh Foreign Area Studies, 3. Washington DC: The American University, 1986.
- Damara, Cindy. *9 Negara Termasuk Indonesia Komunikasi ke Taliban, Minta Bentuk Pemerintahan Demokratis*. 17 September 2021.

[termasuk-indonesia-komunikasi-ke-taliban-minta-bentuk-pemerintahan-demokratis](#), diunduh pada 18 September 2021.

³⁶ Marselinus Gual, "Anggota Komisi I DPR: Jokowi Sudah Bangun Komunikasi Dengan Taliban", dalam <https://www.alinea.id/dunia/komisi-i-dpr-jokowi-sudah-bangun-komunikasi-dengan-taliban-b2c7T95Nw>, diunduh pada 20 September 2021.

- <https://www.liputan6.com/global/read/4659927/9-negara-termasuk-indonesia-komunikasi-ke-taliban-minta-bentuk-pemerintahan-demokratis>.
- Edwards, David B. *Before Taliban: Genealogies of the Afghan Jihad*. California: University of California Press, 2002.
- Fahriani. *Gerakan Taliban di Aghanistan Tahun 1994-2014 M*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Ganewati Wuryandari, Dhurorudin Mashad, Tri Nuke Pujiastuti, Athiqah Nur Alami. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. 2008: Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Gual, Marselinus. *Anggota Komisi I DPR: Jokowi sudah bangun komunikasi dengan Taliban*. 18 Agustus 2021. <https://www.alinea.id/dunia/komisi-i-dpr-jokowi-sudah-bangun-komunikasi-dengan-taliban-b2c7T95Nw>.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Humas. *Di Forum PBB, Menlu RI: Keselamatan dan Kehidupan Masyarakat Afghanistan Prioritas Utama*. 15 September 2021. <https://setkab.go.id/di-forum-pbb-menlu-ri-keselamatan-dan-kehidupan-masyarakat-afghanistan-prioritas-utama/>.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Dorong Perdamaian, Presiden Jokowi Buka Pertemuan Ulama Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan*. 15 September 2021. <https://setkab.go.id/dorong-perdamaian-presiden-jokowi-buka-pertemuan-ulama-indonesia-afghanistan-dan-pakistan/>.
- Iskandar, Muhammad Arief. *Pemerintah Indonesia sumbang pembangunan masjid di Afghanistan*. September 2021. <https://www.antaraneews.com>.
- Iswara, Aditya Jaya. *Kenapa Amerika Meninggalkan Afghanistan sehingga Taliban Merajalela? Begini Ceritanya...* 17 Agustus 2021. <https://internasional.kompas.com/read/2021/08/17/152357470/kenapa-amerika-meninggalkan-afghanistan-sehingga-taliban-merajalela?page=all#page2>.
- Joe Biden Buka Suara Soal Penarikan AS dari Afghanistan. 17 Agustus 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210817085929-134-681383/joe-biden-buka-suara-soal-penarikan-as-dari-afghanistan>.
- Mahar, Ehtasham Anwar. "Realitas Taliban." Dalam *Osama bin Laden Melawan Amerika*, oleh Ahmad Dumyathi Bashori, 77-81. Bandung: Mizan, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2014.
- Nafisah, Durotun. *Afghanistan dibawah pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Nafisah, Durotun. *Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001*. Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

- Nugroho, Indrawati dan Agung Yudhistira. "Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kerangka Politik Luar Negeri Bebas Aktif." *Prosiding Vennas AIHII 9* (2018): 74.
- Nursalikah, Ani. *MUI: Afghanistan Pilih Indonesia Sebagai Juru Damai*. 12 September 2021. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/03/07/p55s9l366-mui-afghanistan-pilih-indonesia-sebagai-juru-damai>.
- Rosyidin, Mohamad. *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Runion, Meredith L. *The History of Afghanistan*. Santa Barbara, California, Greenwood: ABC-CLIO, LLC, 2017.
- Saputra, Andrian. *Hadirkan Taliban Baru*. 18 September 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qzlo17483/hadirkan-taliban-baru>.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Sugara, Robi. "Upaya dan Kontribusi Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai." *Mukadimah*, 2021: 27-38.
- Talumedun, Gryfid. *Mengapa Amerika Serikat Tinggalkan Afghanistan dan Membuat Taliban Berhasil Berkuasa, Simak Kisahnya*. Jum'at Agustus 2021. <https://manado.tribunnews.com/2021/08/20/mengapa-amerika-serikat-tinggalkan-afghanistan-dan-membuat-taliban-berhasil-berkuasa-simak-kisahnya?page=all>.
- Team, Reality Check. *Afghanistan: What has the conflict cost the US and its allies?* 21 September 2021. <https://www.bbc.com/news/world-47391821>.
- Umami, Liza. *Analisa Politik Luar Negeri Afghanistan Terhadap Indonesia Dalam Upaya Mediasi Konflik Afghanistan Tahun 2017-2019*. Surabaya: Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- un.org. *Universal Declaration of Human Rights*. t.thn. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.
- Wirawan, Unggul. *Taliban Janji Hormati Hak-hak Perempuan dan Kebebasan Pers*. 18 September 2021. <https://www.beritasatu.com/dunia/815335/taliban-janji-hormati-hak-hak-perempuan-dan-kebebasan-pers>.
- WorldAtlas. *WorldAtlas.com*. 24 Februari 2021. <https://www.worldatlas.com/maps/afghanistan> (diakses Agustus 27, 2021).
- Yuantisya, Mutia. *Tanggapi Kondisi di Afghanistan, Ulama Perempuan Indonesia Menyampaikan 3 Tuntutan*. 13 September 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-012587087/tanggapi-kondisi-di-afghanistan-ulama-perempuan-indonesia-menyampaikan-3-tuntutan>.
- Zaman, Ali Noer. "Keterlibatan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Upaya Perdamaian Di Afghanistan." *Independen*, 2020.